



# Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Kecamatan Plemahan.

Dewi Fatmaningtyas\*

Puji Astuti

Sugeng

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

## Abstract

*This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, and participation on the management of Village Fund Allocation in achieving good governance in the villages of Plemahan Subdistrict, with internal control as a moderating variable. This study is a quantitative study. The results of this study indicate that accountability and participation have a significant influence on the management of Village Fund Allocation. However, transparency does not significantly influence the management of Village Fund Allocation. The presence of the moderating variable of internal control can moderate the influence of accountability on the management of Village Fund Allocation and moderate the influence of participation on the management of Village Fund Allocation. Meanwhile, internal control cannot moderate the influence of transparency on the management of Village Fund Allocation. This study shows that effective management of Village Fund Allocation does not only depend on accountability and participation but is also greatly influenced by the strength of the internal control system. Therefore, strengthening the internal control system at the village level is an important step to ensure that accountability and community participation can function optimally in achieving good governance.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian *good governance* di desa Kecamatan Plemahan, dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adanya variabel moderasi pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan memoderasi pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan pengendalian internal tidak dapat memoderasi pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif tidak hanya bergantung pada akuntabilitas dan partisipasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal di tingkat desa menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal dalam mewujudkan *good governance*.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pengendalian Internal.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Village Fund Allocation Management, Internal Control.

Correspondence: [\\*dewifatmaningtyas@gmail.com](mailto:*dewifatmaningtyas@gmail.com)



## I. Pendahuluan

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota. ADD bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Yulindawati, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan ADD masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan dana, rendahnya akuntabilitas, minimnya transparansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum sepenuhnya diterapkan di tingkat desa. Padahal, menurut United Nations Development Programme (UNDP,

1997), *good governance* mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik (Rohman & Yuniarti, 2023).

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak berwenang. Hal ini mencakup pelaporan keuangan yang jelas, pelaksanaan program sesuai rencana, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kegiatan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan. Penelitian oleh Garung dan Ga (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, karena dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyimpangan.

Di sisi lain, transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses data terkait penggunaan dana desa. Transparansi tidak hanya menyangkut penyediaan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dan pengawasan publik (Arifin & Runtu, 2023). Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Penelitian oleh Labangu et al. (2022) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan ADD. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Safitri (2023), yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan karena lemahnya pengungkapan informasi di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Menurut Joyce et al. (2020), partisipasi bukan hanya kehadiran fisik, tetapi juga kontribusi pemikiran dan pengambilan keputusan. Penelitian oleh Pahlevi et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, karena dapat memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi.

Namun, ketiga variabel tersebut tidak selalu memberikan hasil yang konsisten dalam berbagai penelitian. Beberapa studi menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, sementara studi lain menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjembatani gap tersebut adalah dengan mempertimbangkan variabel moderasi, yaitu pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut COSO (2013), pengendalian internal mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks desa, pengendalian internal dapat membantu mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat transparansi serta partisipasi masyarakat (Puspa & Prasetyo, 2020).

Penelitian oleh Novrianti et al. (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran. Hal serupa ditemukan oleh Rifa'i et al. (2021), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD. Namun, Adrianti et al. (2023) menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada implementasi dan komitmen aparat desa.

Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, merupakan wilayah yang terdiri dari 17 desa dengan karakteristik pertanian yang dominan. Pemerintah daerah memanfaatkan ADD untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti lemahnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya pengendalian internal. Oleh karena itu, Kecamatan Plemahan menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan ADD, dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana ketiga variabel utama—akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi—berpengaruh terhadap pengelolaan ADD di desa-desa Kecamatan Plemahan. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik *Moderating Regression Analysis* (MRA), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD. Populasi penelitian mencakup seluruh desa di Kecamatan Plemahan, dengan sampel sebanyak 54 responden yang dipilih melalui teknik *probability sampling*. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya, dan analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 30.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, sementara transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengendalian internal terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas dan partisipasi, namun tidak memoderasi pengaruh transparansi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan ADD yang efektif tidak hanya bergantung pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi juga pada kekuatan sistem pengendalian internal yang diterapkan di tingkat desa.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah desa, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, serta membenahi sistem pengendalian internal sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, seperti kapasitas aparatur, integritas kepala desa, dan dukungan teknologi informasi.

## II. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta menganalisis peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai fenomena yang diteliti melalui analisis statistik. Menurut Sugiyono (2020), metode kuantitatif merupakan teknik penelitian yang menggunakan analisis data statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga cocok digunakan dalam penelitian yang bersifat eksplanatif seperti ini.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas, yaitu studi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel. Penelitian kausal memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta menguji apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut (Sugiyono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, variabel independen terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, sedangkan variabel dependen adalah pengelolaan alokasi dana desa. Pengendalian internal berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat mempengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, pada tahun 2024. Kecamatan Plemahan terdiri dari 17 desa, dan setiap desa memiliki perangkat yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, BPD, dan lainnya. Berdasarkan data dari aparat kecamatan, jumlah populasi yang relevan dalam penelitian ini adalah 119 orang. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 54 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian benar-benar representatif dan dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin, yang dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji sebelum digunakan, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner valid dan reliabel (Ghozali, 2021).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 30. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderating Regression Analysis* (MRA), yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta menguji peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat statistik. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi normal,

tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan.

Dengan pendekatan dan teknik analisis yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta peran pengendalian internal dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada prinsip *good governance*.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, yang terdiri dari 17 desa dengan karakteristik wilayah pertanian yang dominan. Pemerintah daerah memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan ADD serta peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi, peneliti menyebarkan kuesioner kepada perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 54 responden dipilih sebagai sampel melalui teknik *probability sampling*, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, BPD, dan perangkat lainnya.

Data yang diperoleh dari kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap pengelolaan ADD di desa mereka. Pada variabel dependen, yaitu pengelolaan alokasi dana desa, rata-rata skor jawaban menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas telah dijalankan dengan baik. Sebagai contoh, pada item yang menilai efisiensi penggunaan anggaran (Y1.1), sebanyak 57,4% responden menyatakan sangat setuju, dan 40,7% menyatakan setuju, dengan rata-rata skor 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perangkat desa menilai pengelolaan dana desa telah dilakukan secara efisien.

Pada variabel akuntabilitas, hasil tabulasi menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pemahaman yang cukup terhadap prosedur pengelolaan dana desa, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin. Item X1.1 yang menilai pemahaman terhadap prosedur memperoleh skor rata-rata 4,35, dengan 53,7% responden menyatakan setuju dan 40,7% sangat setuju. Selain itu, indikator lain seperti pengawasan dan pemeriksaan juga menunjukkan hasil yang baik, dengan skor rata-rata 4,31 dan 4,33 pada item X1.5 dan X1.6. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas telah diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan ADD.

Variabel transparansi menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah dibandingkan akuntabilitas. Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa disampaikan secara terbuka, terdapat beberapa item yang menunjukkan keraguan. Sebagai contoh, pada item X2.2 yang menilai keterbukaan informasi melalui media sosial atau website resmi desa, hanya 42,6% responden yang menyatakan sangat setuju, dan 46,3% menyatakan setuju, dengan skor rata-rata 4,26. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah diterapkan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal penyebaran informasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sementara itu, variabel partisipasi memperoleh skor yang cukup tinggi. Responden menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Item X3.1 yang menilai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memperoleh skor rata-rata 4,50, dengan 51,9% responden menyatakan sangat setuju dan 46,3% setuju. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah menjadi bagian integral dalam pengelolaan ADD, dan perangkat desa menyadari pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

Pengendalian internal sebagai variabel moderasi juga menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar responden menyatakan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik, mencakup aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Item Z1.1 yang menilai dukungan lingkungan pengendalian memperoleh skor rata-rata 4,33, dengan 51,9% responden menyatakan setuju dan 40,7% sangat setuju. Selain itu, item Z1.4 yang menilai kelancaran komunikasi antar perangkat desa memperoleh skor rata-rata 4,44, menunjukkan bahwa koordinasi internal dalam pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, hasil analisis menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk dilakukan regresi. Uji normalitas melalui grafik histogram dan *normal probability plot* menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,098, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Uji

multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen, dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 untuk semua variabel. Uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu, sehingga model regresi layak digunakan.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regression Analysis (MRA)

| Coefficients <sup>a</sup> |                                     |                             |            |                           |      |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|
| Model                     |                                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | Sig. |
|                           |                                     | B                           | Std. Error | Beta                      |      |
| 1                         | (Constant)                          | 4.445                       | 2.525      |                           | .085 |
|                           | Akuntabilitas                       | -2.800                      | 1.183      | -.3.092                   | .022 |
|                           | Transparansi                        | .790                        | .984       | .910                      | .426 |
|                           | Partisipasi                         | 2.727                       | 1.176      | 2.964                     | .025 |
|                           | Akuntabilitas*Pengendalian Internal | .118                        | .046       | 5.772                     | .013 |
|                           | Transparansi*Pengendalian Internal  | -.021                       | .040       | -1.025                    | .601 |
|                           | Partisipasi*Pengendalian Internal   | -.092                       | .045       | -.4346                    | .047 |

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: Output SPSS versi 30

Berdasarkan nilai pada tabel uji koefisien di atas, baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris-baris berikutnya menampilkan koefisien regresi untuk variabel bebas, variabel moderasi, serta interaksi antara variabel bebas dan moderasi. Sehingga, persamaan Moderating Regression Analysis (MRA) dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 \cdot Z + \beta_5 X_2 \cdot Z + \beta_6 X_3 \cdot Z + \varepsilon$$

$$Y = 4,445 - 2,800X_1 + 0,790X_2 + 2,727X_3 + 0,118(X_1 \times Z) - 0,021(X_2 \times Z) - 0,092(X_3 \times Z)$$

Dari persamaan regresi moderasi tersebut, dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Akuntabilitas ( $X_1$ ) dimoderasi oleh Pengendalian Internal ( $Z$ )

1) Nilai konstanta (a) sebesar 4,445

Menunjukkan rata-rata Alokasi Dana Desa ( $Y$ ) ketika seluruh variabel independen dan moderasi bernilai nol.

2) Koefisien Akuntabilitas ( $b_1 = -2,800$ )

Memiliki nilai signifikansi  $0,022 < 0,05$ , menunjukkan bahwa secara langsung, Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara negatif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

3) Akuntabilitas  $\times$  Pengendalian Internal

( $b_4 = 0,118$ ) memiliki nilai signifikan  $0,013 < 0,05$  menunjukkan pengaruh positif secara signifikan yang berarti pengendalian internal berpotensi memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan alokasi dana desa.

b. Transparansi ( $X_2$ ) dimoderasi oleh Pengendalian internal ( $Z$ )

1) Transparansi ( $b_2 = 0,790$ ) menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif namun tidak signifikan, dengan nilai signifikansi  $0,426 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa.

2) Transparansi  $\times$  Pengendalian Internal ( $b_6 = -0,021$ ) menunjukkan pengaruh negatif. Ini berarti pengendalian internal melemahkan hubungan antara transparansi terhadap alokasi dana desa. Namun, nilai signifikansi interaksi ini  $0,601 > 0,05$ , maka efek moderasi ini tidak signifikan.

c. Partisipasi ( $X_3$ ) dimoderasi oleh Pengendalian Internal ( $Z$ )

1) Koefisien Partisipasi ( $b_3 = 2,727$ ) menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan nilai signifikansi  $0,025 < 0,05$ .

- 2) Koefisien Pengendalian Internal × Partisipasi ( $b_7 = -0,092$ ) menunjukkan pengaruh negatif. Ini berarti bahwa pengendalian internal melemahkan partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun nilai signifikansi interaksi ini  $0,047 < 0,05$ , maka efek moderasi ini signifikan.

Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan teknik *Moderating Regression Analysis* (MRA). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD, sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan. Koefisien regresi untuk akuntabilitas adalah  $-2,800$  dengan nilai signifikansi  $0,022$ , menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Koefisien partisipasi adalah  $2,727$  dengan nilai signifikansi  $0,025$ , menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Sementara itu, transparansi memiliki koefisien  $0,790$  dengan nilai signifikansi  $0,426$ , yang berarti tidak berpengaruh signifikan.

Pengendalian internal terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan ADD. Interaksi antara akuntabilitas dan pengendalian internal memiliki koefisien  $0,118$  dengan nilai signifikansi  $0,013$ , menunjukkan bahwa pengendalian internal memperkuat pengaruh akuntabilitas. Interaksi antara partisipasi dan pengendalian internal memiliki koefisien  $-0,092$  dengan nilai signifikansi  $0,047$ , menunjukkan bahwa pengendalian internal juga memoderasi pengaruh partisipasi, meskipun arah pengaruhnya negatif. Sebaliknya, interaksi antara transparansi dan pengendalian internal memiliki koefisien  $-0,021$  dengan nilai signifikansi  $0,601$ , yang berarti tidak signifikan.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary <sup>b</sup>                                                                                                                                                      |                   |          |                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                                                                                                                                                                           | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                                                                                                                                                                               | .858 <sup>a</sup> | .737     | .703              | 1.341                      |
| a. Predictors: (Constant), Partisipasi*Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Transparansi*Pengendalian Internal, Akuntabilitas*Pengendalian Internal |                   |          |                   |                            |
| b. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa                                                                                                                                        |                   |          |                   |                            |

Sumber: Output SPSS versi 30

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar  $0,703$  menunjukkan bahwa  $70,3\%$  variasi dalam pengelolaan ADD dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengendalian internal. Sisanya sebesar  $29,7\%$  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Plemahan telah dilakukan dengan cukup baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun, transparansi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyebaran informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Pengendalian internal terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh akuntabilitas dan partisipasi, sehingga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan desa.

## 3.2. Pembahasan

### 1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (H1)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas sebesar  $0,022$ , yang lebih kecil dari taraf signifikansi  $0,05$ . Dapat dikatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, akuntabilitas mencakup kesesuaian pelaksanaan program dengan standar prosedur, kejelasan pelaporan keuangan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, seperti pelaporan keuangan, tetapi juga bersifat moral dan sosial, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari dana tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Garung & Ga, 2020).

## **2. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (H2)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Transparansi sebesar 0,426, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dapat dikatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, baik dalam bentuk penyampaian informasi keuangan, pengumuman program kerja, maupun keterbukaan anggaran kepada masyarakat, belum terbukti secara statistik mempengaruhi secara langsung bagaimana dana desa dialokasikan dan dikelola. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah transparansi yang hanya bersifat formalitas, seperti sekadar menempelkan laporan keuangan di papan informasi desa tanpa adanya penjelasan yang mendalam atau tanpa memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar dipahami oleh masyarakat. Sehingga belum mampu meminimalisasi potensi penyimpangan atau kelalaian dalam pelaksanaan program yang didanai oleh ADD dan juga karena tingkat partisipasi masyarakat dalam menanggapi atau memanfaatkan informasi transparan tersebut masih rendah, sehingga meskipun transparansi dilakukan, dampaknya terhadap praktik pengelolaan belum terasa signifikan. Hasil ini bisa mengindikasikan bahwa dalam konteks desa yang menjadi objek penelitian, pengelolaan dana desa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti akuntabilitas, dan pengawasan dibandingkan oleh keterbukaan informasi kepada publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Transparansi tidak mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa. (Safitri, 2023).

## **3. Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (H3)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Partisipasi sebesar 0,025, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dapat dikatakan, bahwa Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil ini memberikan bukti bahwa partisipasi masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Partisipasi dalam konteks ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan dana desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program-program pembangunan yang dibiayai melalui alokasi dana desa. Tingkat keterlibatan ini mencerminkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mendorong transparansi, kepercayaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka pengelolaan alokasi dana desa cenderung akan lebih terarah, sesuai kebutuhan yang ada di lapangan, dan lebih mudah dikontrol. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengawas langsung dari setiap kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh aparat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai unsur utama dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. (Pahlevi et al., 2022).

## **4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimoderasi Pengendalian Internal (H4)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,013, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa, Pengendalian Internal secara signifikan memoderasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Pengelolaan alokasi dana desa.

Pengendalian internal yang efektif mencakup elemen-elemen seperti pengawasan jajaran perangkat desa, pemisahan tugas, prosedur pengelolaan dana, serta pemantauan berkelanjutan. Ketika elemen-elemen ini dijalankan dengan baik, maka akuntabilitas dalam bentuk pelaporan, pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan dana menjadi lebih optimal dan berdampak nyata terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dengan demikian, desa yang memiliki sistem pengendalian internal yang kuat cenderung dapat memaksimalkan efek positif dari akuntabilitas terhadap tata kelola keuangan desa. Secara praktis, hal ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal di tingkat desa. Tidak cukup hanya meningkatkan akuntabilitas dalam bentuk pelaporan formal, namun juga diperlukan pembenahan struktur pengendalian internal agar akuntabilitas tersebut dapat menghasilkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan kata lain, akuntabilitas dan pengendalian internal harus berjalan sinergis satu melengkapi yang lain.

Dengan demikian pada penelitian ini selaras dengan kajian akademis sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sering berperan sebagai variabel moderasi yang menerjemahkan intensi akuntabilitas menjadi kinerja nyata dalam hal ini pengelolaan dana public seperti yang ditemukan

pada penelitian di Universitas Negeri Semarang, dimana pengendalian internal terbukti memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran Hal serupa juga terlihat pada konteks pemerintahan desa, di mana efektivitas sistem pengendalian internal terbukti meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.(Novrianti et al., 2022).

#### **5. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimoderasi Pengendalian Internal (H5)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,601, yang lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa, Pengendalian Internal secara signifikan tidak memoderasi hubungan antara Transparansi terhadap Pengelolaan alokasi dana desa.

Keberadaan pengendalian internal yang ada saat ini belum mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, misalnya pengendalian internal yang diterapkan belum berjalan secara efektif, kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pengawasan internal, atau lemahnya implementasi dari aspek-aspek penting dalam sistem pengendalian, seperti pemantauan, evaluasi risiko, maupun prosedur pelaporan yang tepat waktu dan akurat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi yang tinggi tidak selalu berdampak signifikan terhadap kualitas pengelolaan alokasi dana desa jika tidak dibarengi dengan pengendalian internal yang kuat dan berfungsi secara optimal. Dengan kata lain, transparansi saja belum cukup untuk menjamin pengelolaan dana desa yang akuntabel dan efisien, apabila sistem kontrol internal yang mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan dana desa tidak dijalankan dengan benar.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih memperhatikan efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang sesuai, serta memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.(Suryani & Hidayat, 2023)

#### **6. Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dimoderasi Pengendalian Internal (H6)**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,047, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa Pengendalian Internal secara signifikan memoderasi hubungan antara Partisipasi terhadap Pengelolaan alokasi dana desa.

Pengendalian Internal mampu memperkuat atau mempengaruhi arah serta besarnya pengaruh Partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mekanisme pengendalian internal di desa berjalan secara efektif, maka partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa akan semakin optimal dan terarah.

Pengendalian internal yang baik akan menciptakan struktur kebijakan dan prosedur yang mampu mencegah kesalahan, kecurangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peran serta masyarakat tidak hanya sekadar memberikan masukan atau terlibat dalam musyawarah, tetapi juga turut diawasi dan diarahkan oleh sistem pengendalian yang berlaku di pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan teori sistem pengendalian internal menurut COSO (2013), yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan komponen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi. Ketika pengawasan internal dilakukan secara memadai, maka tingkat partisipasi masyarakat pun akan lebih efektif dalam mendorong pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab dan efisien.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki peran strategis sebagai variabel moderasi dalam pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam konteks partisipatif.(Budiati et al., 2020)

### **IV. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan *good governance*, dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD di desa-desa

Kecamatan Plemahan. Akuntabilitas yang baik mencerminkan adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam pelaksanaan program dan pelaporan keuangan, sementara partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan desa.

Sebaliknya, transparansi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan ADD. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pengelolaan dana yang lebih baik. Transparansi yang hanya bersifat formal atau administratif belum cukup untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa jika tidak disertai dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

Pengendalian internal terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan ADD. Sistem pengendalian internal yang kuat mampu memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan partisipasi dengan efektivitas pengelolaan dana desa. Namun, pengendalian internal tidak memoderasi pengaruh transparansi, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian yang ada belum mampu memperkuat dampak transparansi terhadap pengelolaan ADD secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan partisipasi, serta perlunya penguatan sistem pengendalian internal untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

## Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait. Pertama, bagi pemerintah desa, perlu dilakukan penguatan akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang lebih transparan, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan dengan membuka ruang dialog yang lebih luas, seperti musyawarah desa yang inklusif dan forum evaluasi program pembangunan.

Kedua, transparansi perlu ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk penyediaan informasi, tetapi juga dalam hal aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti website desa, media sosial, atau aplikasi berbasis komunitas untuk menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan secara real-time dan interaktif.

Ketiga, pengendalian internal harus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa mengenai pentingnya sistem pengawasan internal yang efektif. Penyusunan prosedur operasional standar (SOP), pemisahan tugas yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program desa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Keempat, bagi pemerintah daerah dan kecamatan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembinaan dan pengawasan yang lebih terarah terhadap pengelolaan ADD.

## Daftar Pustaka

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Hardianti, P. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Gowa. *Income Journal*, 2(1), 33–44.
- Arifin, M., & Runtu, T. (2023). Transparency and Accountability of the Village Government in Managing Village Fund Allocations. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 1281–1296.
- COSO. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Joyce, J., Lenak, C. N., & Tampi, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 13–22.
- Labangu, Y. L., & Anto, L. O. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Novrianti, D., Rusdarti, & Cahyaningdyah, D. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran. *Business and Economic Analysis Journal*, 2(2), 121–133.
- Pahlevi, M. I., & Susilowati, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 5(3), 1480–1486.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928.
- Rohman, M. T., & Yuniarti, N. L. (2023). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 31–42.
- Safitri, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Alokasi Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 250–259.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. United Nations Development Programme.
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 107–123.